



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Daya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6831);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantiiian Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 100), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun berikutnya.
5. Pajak Daerah adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
7. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
9. Pajak Restoran adalah pajak atas Pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Pajak Hiburan adalah pajak atas Penyelenggaraan hiburan.
11. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
12. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
13. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
14. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai sesuatu, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
15. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
17. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
18. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainrinya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
19. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
20. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dan Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
21. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
22. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dan pihak lain sehingga Daerah tersebut terbebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.722.942.015.206,00 (Satu trilyun Tujuh ratus dua puluh dua Milyar Sembilan ratus empat puluh Dua Juta Lima belas ribu Dua ratus enam rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 206.345.812.361,00 (Dua ratus enam

milyar Tiga ratus empat puluh lima juta Delapan ratus dua belas ribu Tiga ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah; dan
 - b. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.177.828.712.361,00 (Seratus tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 28.517.100.000,00 (Dua puluh delapan milyar lima ratus tujuh belas juta seratus ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.177.828.712.361,00 (Seratus tujuh puluh tujuh Milyard Delapan ratus dua puluh delapan juta Tujuh ratus dua belas ribu Tiga ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak kendaraan bermotor;
 - b. bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB);
 - c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB);
 - d. pajak air permukaan; dan
 - e. pajak rokok.
- (2) Pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.818.749.100,00 (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah).
- (3) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.829.186.600,00 (Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (4) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 106.034.632.968,00 (Seratus enam milyar tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (5) Pajak air permukaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.759.750,00 (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- (6) Pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 50.136.383.943,00 (lima puluh milyar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.818.749.100,00 (Dua belas milyar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. mobil penumpang-sedan;
 - b. mobil penumpang-jeep;
 - c. mobil penumpang-minibus;
 - d. mobil bus-mikrobus;
 - e. mobil Bus-bus;
 - f. mobil barang/beban-pickup;
 - g. mobil barang/beban-Light truck;
 - h. mobil barang/beban-truck;
 - i. mobil barang/beban-blind van;
 - j. sepeda motor-sepeda motor roda dua; dan
 - k. sepeda motor-sepeda motor roda tiga.
- (2) Mobil penumpang-sedan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.818.749.100,00 (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah).
- (3) Mobil penumpang-jeep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol).
- (4) Mobil penumpang-minibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol).
- (5) Mobil bus-mikrobus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol).
- (6) Mobil bus-bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol).
- (7) Mobil barang/beban-pickup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol).
- (8) Mobil barang/beban- Light truck sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol).

- (9) Mobil barang/beban-truck sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol).
- (10) Mobil barang/beban-blind van sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol).
- (11) Mobil sepeda motor-sepeda motor roda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 0.00 (nol).
- (12) Mobil sepeda motor-sepeda motor roda tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.722.942.015.206,00 (Satu trilyun Tujuh ratus dua puluh dua Milyar Sembilan ratus empat puluh Dua Juta Lima belas ribu Dua ratus enam rupiah), yang terdiri atas belanja:

- a. operasional;
- b. modal;
- c. tidak terduga; dan
- d. transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.108.103.032.356,00 (Satu trilyun seratus delapan milyar seratus tiga juta tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas belanja:
 - a. pegawai;
 - b. barang dan jasa;
 - c. bunga;
 - d. subsidi;
 - e. hibah; dan
 - f. bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 307.932.588.054,00 (Tiga ratus tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 621.211.251.432,25 (Enam ratus dua puluh satu

milyar dua ratus sebelas juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah dua puluh lima sen).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 158.469.192.869,75 (Seratus lima puluh delapan milyar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 20.490.000.000,00 (Dua puluh milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 8.576.375.845,00 (Delapan milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 10

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.576.375.845,00 (Delapan milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.576.375.845,00

(Lima Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000 (Tiga Milyar).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol).

Pasal 12

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp.8.576.375.845,00) (Delapan milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah)
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 8.576.375.845,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

Pasal 13

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum *Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan*;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja bagi hasil Kepada Pemerintah Kabupaten;
- g. Lampiran VII Rencana Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan *Sub Rincian Objek* Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Pasal 14

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 14 Januari 2025

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 14 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

CAP/TTD

JHONI WAY

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2025 NOMOR 1



PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA,
DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	206.345.812.361,00
4.1.01	Pajak Daerah	177.828.712.361,00
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	12.818.749.100,00
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	12.818.749.100,00
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	12.818.749.100,00
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	8.829.186.600,00
4.1.01.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	8.829.186.600,00
4.1.01.02.01.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	8.829.186.600,00
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	106.034.632.968,00
4.1.01.03.04	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	106.034.632.968,00
4.1.01.03.04.0001	PBBKB Bahan Bakar Lainnya	106.034.632.968,00
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	9.759.750,00
4.1.01.04.01	Pajak Air Permukaan	9.759.750,00
4.1.01.04.01.0001	Pajak Air Permukaan	9.759.750,00
4.1.01.05	Pajak Rokok	50.136.383.943,00
4.1.01.05.01	Pajak Rokok	50.136.383.943,00
4.1.01.05.01.0001	Pajak Rokok	50.136.383.943,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	28.517.100.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	2.000.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	26.517.100.000,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	22.517.100.000,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	22.517.100.000,00
4.1.04.16.03	Pendapatan BLUD dari Hibah	4.000.000.000,00
4.1.04.16.03.0001	Pendapatan BLUD dari Hibah Terikat	4.000.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.508.019.827.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.508.019.827.000,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	707.597.506.000,00
4.2.01.03.08	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua	179.425.428.000,00
4.2.01.03.08.0003	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	179.425.428.000,00
4.2.01.03.09	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua	17.726.073.000,00
4.2.01.03.09.0001	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Pendidikan	17.726.073.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.03.10	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua	167.251.486.000,00
4.2.01.03.10.0001	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Pendidikan	167.251.486.000,00
4.2.01.03.11	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua	217.148.414.000,00
4.2.01.03.11.0001	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	217.148.414.000,00
4.2.01.03.12	DTI-Papua	126.046.105.000,00
4.2.01.03.12.0001	DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	126.046.105.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	83.946.237.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	42.134.543.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	26.145.568.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	15.988.975.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	40.661.320.000,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	7.774.061.000,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	32.123.880.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	57.658.000,00
4.2.01.07.02.0008	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	705.721.000,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	1.150.374.000,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	1.150.374.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	613.815.791.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	459.226.943.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	459.226.943.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	154.588.848.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	985.010.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	3.460.988.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	21.372.705.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	128.770.145.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	102.660.293.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	92.920.469.000,00
4.2.01.09.01.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	17.100.000.000,00
4.2.01.09.01.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	11.392.096.000,00
4.2.01.09.01.0077	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	39.556.145.000,00
4.2.01.09.01.0080	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Pengembangan Food Estate	24.872.228.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	9.739.824.000,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	1.318.050.000,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	72.500.000,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	2.692.402.000,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	70.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5.386.383.000,00
4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	199.989.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.714.365.639.361,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.108.103.032.356,00
5.1.01	Belanja Pegawai	307.932.588.054,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	174.733.718.710,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	124.679.589.121,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	123.694.579.121,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	985.010.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	8.933.248.617,20
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	8.933.248.617,20
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.078.701.076,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.078.701.076,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.593.125.958,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.593.125.958,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	8.744.381.175,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	8.744.381.175,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	440.368.871,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	440.368.871,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.916.535,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.916.535,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	7.912.081.870,89
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	7.912.081.870,89
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	245.553.526,91
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	245.553.526,91
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	699.598.819,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	699.598.819,00
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)	13.405.153.140,00
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	13.405.153.140,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	72.272.902.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	69.510.000.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	69.510.000.000,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.762.902.000,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	2.692.402.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	70.500.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	33.317.235.504,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.402.800.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.402.800.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	196.392.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	196.392.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	400.400.000,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	400.400.000,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	130.260.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	130.260.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.034.060.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.034.060.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	811.492.500,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	811.492.500,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.148.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.148.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.188.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.188.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	580.573.500,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	580.573.500,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	572.000,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	572.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	12.448.685.504,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	1.246.822.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	93.435.544,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	224.427.960,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	10.884.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8.976.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8.976.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	300.593.440,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	13.608.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	13.608.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	135.800.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	135.800.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	21.840.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	21.840.000,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.232.000,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.232.000,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	16.800,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	16.800,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	42.336.000,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	42.336.000,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	2.540.160,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	2.540.160,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	7.620.480,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	7.620.480,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	984.000.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	234.000.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	234.000.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	750.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	750.000.000,00
5.1.01.07	Belanja Gaji dan Tunjangan MRP	19.110.938.400,00
5.1.01.07.01	Belanja Uang Representasi MRP	3.519.720.350,00
5.1.01.07.01.0001	Belanja Uang Representasi MRP	3.519.720.350,00
5.1.01.07.02	Belanja Tunjangan Keluarga MRP	430.118.400,00
5.1.01.07.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga MRP	430.118.400,00
5.1.01.07.03	Belanja Tunjangan Beras MRP	331.680.000,00
5.1.01.07.03.0001	Belanja Tunjangan Beras MRP	331.680.000,00
5.1.01.07.04	Belanja Uang Paket MRP	381.324.000,00
5.1.01.07.04.0001	Belanja Uang Paket MRP	381.324.000,00
5.1.01.07.05	Belanja Tunjangan Jabatan MRP	2.117.887.650,00
5.1.01.07.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan MRP	2.117.887.650,00
5.1.01.07.06	Belanja Tunjangan Kelompok Kerja MRP	233.048.000,00
5.1.01.07.06.0001	Belanja Tunjangan Kelompok Kerja MRP	233.048.000,00
5.1.01.07.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif MRP	2.656.360.000,00
5.1.01.07.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif MRP	2.656.360.000,00
5.1.01.07.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota MRP	381.400.000,00
5.1.01.07.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota MRP	381.400.000,00
5.1.01.07.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP	9.059.400.000,00
5.1.01.07.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi MRP	259.400.000,00
5.1.01.07.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan MRP	8.800.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	7.213.200.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	7.213.200.000,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	7.213.200.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	621.211.251.432,25
5.1.02.01	Belanja Barang	168.493.017.964,25
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	167.260.350.964,25
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.157.956.130,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.709.757.800,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	20.000.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.493.600.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	339.000.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	832.990.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	559.632.740,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.258.476.968,86
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.494.924.740,25
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.761.166.727,14
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	588.590.775,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.860.962.250,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	575.223.600,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	479.128.800,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	608.260.200,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	371.000.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.295.500.765,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	7.809.835.580,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	866.835.850,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	16.238.024.100,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	22.336.110.780,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	17.730.607.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	575.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.893.450.100,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.691.357.008,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	5.554.266.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.346.456.050,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	500.000.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	330.000.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	280.500.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	67.500.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	704.700.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	577.000.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	216.385.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	136.152.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	200.000.000,00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	200.000.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.032.667.000,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	22.397.000,00
5.1.02.01.04.0118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	10.270.000,00
5.1.02.01.04.0527	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.000.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	225.418.628.541,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	70.043.688.891,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.451.150.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.751.750.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	16.200.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	132.950.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	912.270.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	57.500.000,00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	79.050.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	63.600.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.237.850.201,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	15.000.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	366.100.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.599.344.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	322.701.919,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.616.764.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	511.992.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.846.504.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.763.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.470.336.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.240.774.560,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	935.370.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	1.772.280.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	661.500.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	6.824.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.601.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	356.275.200,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1.686.158.536,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.500.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.711.465.664,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	227.992.808,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	45.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	165.000.000,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	1.000.000.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	364.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.309.250.003,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	562.560.000,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	327.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	31.865.867.200,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	2.265.014.400,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	13.950.400.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	15.626.452.800,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	24.000.000,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	44.000.000,00
5.1.02.02.03.0017	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	44.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	49.269.252.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	33.479.752.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	735.000.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	2.240.000.000,00
5.1.02.02.04.0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	5.090.000.000,00
5.1.02.02.04.0058	Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	900.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	6.652.000.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	172.500.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	33.295.610.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.189.500.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	611.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	18.608.870.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	60.000.000,00
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	211.200.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	9.615.040.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	2.000.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	10.741.172.450,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	150.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	310.000.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	757.824.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	5.800.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	2.873.348.450,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	850.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	7.564.880.000,00
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	1.000.000.000,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	400.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.064.880.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	5.100.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	15.023.000.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	195.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	14.828.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.571.158.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.056.300.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.952.188.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	562.670.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	11.195.676.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.045.280.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	600.160.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	624.250.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	70.560.000,00
5.1.02.03.02.0048	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	20.240.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	502.550.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	220.330.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.190.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.450.396.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.957.236.000,00
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.500.000.000,00
5.1.02.03.03.0049	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun	4.993.160.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	700.000.000,00
5.1.02.03.04.0100	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	700.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	133.699.095.927,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	127.650.176.527,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100.704.375.727,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.838.360.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.107.440.800,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	6.048.919.400,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	6.048.919.400,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	62.925.583.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	62.925.583.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	335.583.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	62.590.000.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	1.390.550.000,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	1.390.550.000,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	1.318.050.000,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	72.500.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	18.088.700.000,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	18.088.700.000,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	18.088.700.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	158.469.192.869,75
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	3.797.063.100,00
5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	3.797.063.100,00
5.1.05.02.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	3.797.063.100,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	154.672.129.769,75
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	115.907.844.769,75
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	115.907.844.769,75
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.600.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.600.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	32.500.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	32.500.000.000,00
5.1.05.05.05	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	664.285.000,00
5.1.05.05.05.0001	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	664.285.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.000.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	20.490.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	20.490.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	20.490.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	20.490.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	367.609.308.881,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.306.895.390,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	12.585.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.750.000.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	5.750.000.000,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	6.835.000.000,00
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	6.835.000.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	2.016.594.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	2.016.594.000,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	16.594.000,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	2.000.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.031.312.600,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	138.932.500,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	138.932.500,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	768.960.100,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	546.226.600,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	30.552.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	73.036.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	83.095.500,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	36.050.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	123.420.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	15.000.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	74.760.000,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	15.100.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	18.560.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	406.707.690,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	401.707.690,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	12.671.040,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	36.050.000,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	347.986.650,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	5.000.000,00
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	5.000.000,00
5.2.02.06.04.0006	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	5.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.447.181.100,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.257.638.900,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.257.638.900,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	189.542.200,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	61.894.200,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	127.648.000,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	272.100.000,00
5.2.02.11.01	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	272.100.000,00
5.2.02.11.01.0003	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi Lainnya	272.100.000,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	598.000.000,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	598.000.000,00
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	598.000.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	3.950.000.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	3.950.000.000,00
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	2.150.000.000,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	1.800.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57.400.268.272,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	57.400.268.272,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	56.407.108.272,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	30.616.446.368,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	5.300.661.904,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.940.000.000,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	16.550.000.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	993.160.000,00
5.2.03.01.02.0012	Belanja Modal Rumah Tidak Bersusun	993.160.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	282.431.866.969,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	227.565.169.689,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	195.723.442.372,00
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	195.723.442.372,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	31.841.727.317,00
5.2.04.01.02.0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	31.841.727.317,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	29.259.431.280,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	21.066.336.600,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	11.211.096.000,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	9.855.240.600,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	8.193.094.680,00
5.2.04.02.06.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	8.193.094.680,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	25.607.266.000,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	24.725.000.000,00
5.2.04.03.05.0003	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	2.560.000.000,00
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	22.165.000.000,00
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	882.266.000,00
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	882.266.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.270.278.250,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	45.078.250,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	45.078.250,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	45.078.250,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	10.000.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	10.000.000,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	10.000.000,00
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	4.215.200.000,00
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	4.215.200.000,00
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	4.215.200.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	200.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	200.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	200.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.420.790.956,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.420.790.956,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	8.420.790.956,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	8.420.790.956,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	8.420.790.956,00
5.4	BELANJA TRANSFER	238.808.883.013,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	109.324.591.713,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	109.324.591.713,00
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	109.324.591.713,00
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	109.324.591.713,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	129.484.291.300,00
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	0,00
5.4.02.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	0,00
5.4.02.01.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	0,00
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	129.484.291.300,00
5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	129.484.291.300,00
5.4.02.03.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	129.484.291.300,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Belanja	1.722.942.015.206,00
	Total Surplus/(Defisit)	-8.576.375.845,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	8.576.375.845,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	8.576.375.845,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	5.576.375.845,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	5.576.375.845,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	5.576.375.845,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	3.000.000.000,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	3.000.000.000,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	3.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	8.576.375.845,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD



PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	1.714.365.639.361,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	206.345.812.361,00	
4.1.01	Pajak Daerah	177.828.712.361,00	
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	12.818.749.100,00	
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	12.818.749.100,00	
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	12.818.749.100,00	
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	8.829.186.600,00	
4.1.01.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	8.829.186.600,00	
4.1.01.02.01.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	8.829.186.600,00	
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	106.034.632.968,00	
4.1.01.03.04	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	106.034.632.968,00	
4.1.01.03.04.0001	PBBKB Bahan Bakar Lainnya	106.034.632.968,00	
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	9.759.750,00	
4.1.01.04.01	Pajak Air Permukaan	9.759.750,00	
4.1.01.04.01.0001	Pajak Air Permukaan	9.759.750,00	
4.1.01.05	Pajak Rokok	50.136.383.943,00	
4.1.01.05.01	Pajak Rokok	50.136.383.943,00	
4.1.01.05.01.0001	Pajak Rokok	50.136.383.943,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	28.517.100.000,00	
4.1.04.05	Jasa Giro	2.000.000.000,00	
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00	
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00	
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	26.517.100.000,00	
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	22.517.100.000,00	
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	22.517.100.000,00	
4.1.04.16.03	Pendapatan BLUD dari Hibah	4.000.000.000,00	
4.1.04.16.03.0001	Pendapatan BLUD dari Hibah Terikat	4.000.000.000,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.508.019.827.000,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.508.019.827.000,00	
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	707.597.506.000,00	
4.2.01.03.08	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua	179.425.428.000,00	

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran III Peraturan Gubernur
Nomor : 1 TAHUN 2025
Tanggal : 14 Januari 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
1	Hibah Partai Politik	Sorong	414.648.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			414.648.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			414.648.000,00
	BIRO PEREKONOMIAN DAERAH		
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		
2	CV. MAKASAR COMPUTINDO	Jl. POROS UJUNG PANDANG, MAROS, KM 21	150.000.000,00
3	UNIMUDA SORONG	KABUPATEN SORONG	250.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			400.000.000,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD		
4	Universitas Negeri Papua Manokwari	Jl. Gunung Salju, Amban	200.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			200.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD BIRO PEREKONOMIAN DAERAH			600.000.000,00
	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
	Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
5	Hibah Kab/Kota	Provinsi Papua Barat Daya	500.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			500.000.000,00
	Fasilitasi Induk Cabang Olahraga atau Organisasi Keolahragaan dalam menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi		
6	Lari marathon	sorong	500.000.000,00
7	MPC	Sorong	250.000.000,00
8	KORMI	KOTA SORONG	250.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			1.000.000.000,00
	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga		
9	PORNAS	Sorong	1.000.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			1.000.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			2.500.000.000,00
	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
10	Rumah Sakit Kabupaten Sorong	Kabupaten Sorong	3.797.063.100,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			3.797.063.100,00
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Untuk Wahana Pendidikan		
11	UNIVERSITAS NEGERI PAPUA (UNIPA)	KOTA SORONG	4.176.720.870,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			4.176.720.870,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			7.973.783.970,00
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	Penyediaan Bantuan fasilitas bagi pendidikan		
12	YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN	SORONG	1.000.000.000,00
13	YPPK	SORONG	1.000.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
14	YAYASAN BEJANA KASIH BUMI PAPUA	YOGYAKARTA	5.000.000.000,00
15	YPPGI	SORONG	1.000.000.000,00
16	YAYASAN PENDIDIKAN ADVENT	SORONG	1.000.000.000,00
17	UMS SORONG	KOTA SORONG	5.000.000.000,00
18	UNIVERSITAS VICTORY SORONG	KOTA SORONG	1.000.000.000,00
19	POLITEKNIK SAINT PAUL	KOTA SORONG	1.000.000.000,00
20	STIKES PAPUA SORONG	KOTA SORONG	1.000.000.000,00
21	UNIVERSITAS NANI BILI	SORONG	1.000.000.000,00
22	SINAR MITRA SOLUTION	KOTA SORONG	1.500.000.000,00
23	SMP YPK DOOM	PULAU DOOM	6.500.000.000,00
24	SMA NEGERI 1 AIFAT	AIFAT	2.000.000.000,00
25	SMP YPK SELEBE SOLU	MALIBELA	1.500.000.000,00
26	PKBM KASIH RUMAI KOTEKA	KOTA SORONG	1.000.000.000,00
27	SD YPK EBENHASER FUOQ	MAYBRAT	1.000.000.000,00
28	SD NEGERI 15 FAFANLAP	RAJA AMPAT	1.000.000.000,00
29	SD YPK KALFARI SKENDI	TEMINABUAN	1.000.000.000,00
30	SD INPRES PERSIAPAN TAHSIMARA	TAHSIMARA	500.000.000,00
31	SD YPPK KAMAT	KAMPUNG KAMAT	500.000.000,00
32	SMK NEGERI 1 KOTA SORONG	KOTA SORONG	500.000.000,00
33	SMK PETRA KAIS	SORONG SELATAN	1.000.000.000,00
34			187.390.236,00
35	AGRIBISNIS PARIWISATA	RAJA AMPAT	1.000.000.000,00
36	D3 KEHUTANAN TAMBRAUW	TAMBRAUW	500.000.000,00
37	AGRIBISNIS PARIWISATA	RAJA AMPAT	0,00
38	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PELAYARAN (BP2IP) SORONG-OTSUS SG	KOTA SORONG	1.000.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
39	SMK INANWATAN	INANWATAN	1.000.000.000,00
40	SMP NEGERI 2 AIFAT	MAYBRAT	1.500.000.000,00
41	PGRI PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	KOTA SORONG	1.000.000.000,00
42	YAYASAN PENDIDIKAN GOLDEN GATE UTAMA	SORONG	15.000.000.000,00
43	YAPIS	SORONG	1.000.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			58.187.390.236,00
	Penyediaan Bantuan pembiayaan bagi pendidikan		
44	SEKOLAH UNGGULAN KOTA SORONG	KOTA SORONG	1.500.000.000,00
45	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA	PAPUA	4.300.000.000,00
46	SEKOLAH UNGGULAN KABUPATEN MAYBRAT	MAYBRAT	3.000.000.000,00
47	SEKOLAH UNGGULAN KABUPATEN TAMBRAUW	TAMBRAUW	3.000.000.000,00
48	SEKOLAH UNGGULAN KABUPATEN SORONG SELATAN	SORONG SELATAN	3.000.000.000,00
49	SEKOLAH UNGGULAN KABUPATEN RAJA AMPAT	RAJA AMPAT	3.000.000.000,00
50	SEKOLAH UNGGULAN KABUPATEN SORONG	KABUPATEN SORONG	3.000.000.000,00
51	AKADEMI MILITER	MAGELANG	0,00
52	AKADEMI KEPOLISIAN	JAKARTA	0,00
53	SEKOLAH TINGGI ILMU AKUNTANSI	JAKARTA	0,00
54	STPDN	JATINANGOR	0,00
55	SEKOLAH UNGGULAN KOTA SORONG	KOTA SORONG	3.829.085.663,75
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			24.629.085.663,75
JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			82.816.475.899,75
	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian		
56			500.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			500.000.000,00
	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang		
57	Kelompok Tani	Papua Barat Daya	49.969.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			49.969.000,00
	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek		
58	Kelompok Tani	Papua Barat Daya	114.316.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			114.316.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN			664.285.000,00
	SEKRETARIAT DAERAH		
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		
59	BAZNAS PROV PAPUA BARAT/BARAT DAYA	PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	1.000.000.000,00
60	MASJID RAYA AL AKBAR	JLN. AHMAD YANI NO. 40	15.000.000.000,00
61	KDEKS PROVONSI PAPUA BARAT DAYA	PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	500.000.000,00
62	PANITIA PESPARAWI NASIONAL	PROV PBD	5.000.000.000,00
63	ICMI	SORONG	500.000.000,00
64	LPTQ PROV. PAPUA BARAT DAYA	PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	1.000.000.000,00
65	LEMBAGA KEAGAMAAN	PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	21.000.000.000,00
66	PHBI PROV. PAPUA BARAT DAYA	PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	1.500.000.000,00
67	MUI PAPUA BARAT DAYA	PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	1.000.000.000,00
68	BPH KANWIL KEMENAG PAPUA BARAT DAYA	PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	1.500.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
69	Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permaubudhi) Prov. Papua Barat Daya	PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	500.000.000,00
70	Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Prov. Papua Barat Daya	PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	500.000.000,00
71	PESPARANI PROV. PAPUA BARAT DAYA	PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	1.000.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			50.000.000.000,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum		
72	KONI	JL. Misol	2.000.000.000,00
73	MIPI	SORONG	1.000.000.000,00
74	LEMBAGA VERTIKAL DAN INSTANSI LAINNYA	SORONG	7.500.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			10.500.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
75	PKK PROV PBD	SORONG	2.000.000.000,00
76	DHARMAWANITA	SORONG	1.000.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			3.000.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD SEKRETARIAT DAERAH			63.500.000.000,00



Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
 DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP		
1			150.000.000,00
2			2.700.000.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			2.850.000.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			2.850.000.000,00
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	Fasilitasi Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial		
3	LANSIA DIATAS 65 TAHUN	SELURUH WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	17.640.000.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			17.640.000.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			17.640.000.000,00

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD



PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH		
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi		
1	Kab. Sorong		129.484.291.300,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			129.484.291.300,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH			129.484.291.300,00
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	Penyediaan Bantuan pembiayaan bagi pendidikan		
2	Kab. Maybrat		0,00
3	Kab. Tambrauw		0,00
4	Kab. Sorong Selatan		0,00
5			0,00
6	Kab. Sorong		0,00
7	Kota Sorong		0,00
8	Kab. Raja Ampat		0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			0,00



Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH		
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi		
1	Kota Sorong		35.095.468.760,00
2	Kab. Sorong Selatan		74.224.243.078,00
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		
3	Kota Sorong		4.879.875,00

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum,
D. Anade Nauw, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19721116 200212 2 001



PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	SUMBER DANA	LOKASI
1	2	3	4	5
1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	112.029.093.845,00		
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	4.774.207.000,00		
1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	4.774.207.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
5	BELANJA DAERAH	4.774.207.000,00		
5.1	BELANJA OPERASI	4.774.207.000,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.774.207.000,00		
5.1.02.01	Belanja Barang	1.297.423.000,00		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.297.423.000,00		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	71.862.000,00	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.624.000,00	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	51.256.000,00	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.476.000,00	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	425.000.000,00	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	68.535.000,00	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	549.300.000,00	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	116.370.000,00	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.103.700.000,00		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	326.700.000,00		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	241.600.000,00	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	SUMBER DANA	LOKASI
1	2	3	4	5
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	13.748.000,00	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Kelembagaan	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.634.000,00	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Kelembagaan	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.065.600,00	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Kelembagaan	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.671.000,00	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Kelembagaan	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	379.409.000,00	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Kelembagaan	
5.1.02.02	Belanja Jasa	393.890.000,00		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	85.300.000,00		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	81.200.000,00	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Kelembagaan	
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.600.000,00	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Kelembagaan	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.500.000,00	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Kelembagaan	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	16.000.000,00		
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	16.000.000,00	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Kelembagaan	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	292.590.000,00		
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	98.190.000,00	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Kelembagaan	
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	194.400.000,00	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Kelembagaan	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	507.997.000,00		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	507.997.000,00		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	370.543.000,00	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Kelembagaan	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	47.500.000,00	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Kelembagaan	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	89.954.000,00	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Kelembagaan	

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum,



Dr. Anace Masuw, S.H., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 197211162002122001

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTUKTUR MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK,
DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	SUMBER DANA	LOKASI
1	2	3	4	5
1.03.1.04.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	70.776.173.530,00		
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	70.776.173.530,00		
1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	64.203.504.030,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
5	BELANJA DAERAH	64.203.504.030,00		
5.1	BELANJA OPERASI	501.184.000,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	501.184.000,00		
5.1.02.02	Belanja Jasa	381.080.000,00		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	281.020.000,00		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	223.120.000,00	DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	57.900.000,00	DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	100.060.000,00		
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	100.060.000,00	DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	120.104.000,00		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	120.104.000,00		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	108.704.000,00	DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.400.000,00	DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	
5.2	BELANJA MODAL	63.702.320.030,00		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	63.702.320.030,00		
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	63.702.320.030,00		
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	63.702.320.030,00		

5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	63.702.320.030,00	DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	SUMBER DANA	LOKASI
1	2	3	4	5
1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan	6.572.669.500,00		Kab. Sorong Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Raja Ampat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maybrat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
5	BELANJA DAERAH	6.572.669.500,00		
5.1	BELANJA OPERASI	23.008.000,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.008.000,00		
5.1.02.02	Belanja Jasa	10.500.000,00		
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.500.000,00		
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	10.500.000,00	DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	12.508.000,00		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.508.000,00		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.508.000,00	DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	
5.2	BELANJA MODAL	6.549.661.500,00		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.549.661.500,00		
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	6.549.661.500,00		
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	6.549.661.500,00		
5.2.04.01.02.0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	6.549.661.500,00	DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	
2.07.3.29.3.32.06.0000 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	26.000.000.000,00		
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	26.000.000.000,00		

3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	26.000.000.000,00		Kab. Sorong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sorong Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Raja Ampat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tambrauw, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maybrat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	SUMBER DANA	LOKASI
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	26.000.000.000,00		
5.1	BELANJA OPERASI	392.734.000,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	392.734.000,00		
5.1.02.01	Belanja Barang	1.192.000,00		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.192.000,00		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	142.400,00	DTI-Papua-Energi Listrik	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	783.000,00	DTI-Papua-Energi Listrik	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	39.000,00	DTI-Papua-Energi Listrik	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	227.600,00	DTI-Papua-Energi Listrik	
5.1.02.02	Belanja Jasa	332.250.000,00		
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	332.250.000,00		
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	92.250.000,00	DTI-Papua-Energi Listrik	
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	240.000.000,00	DTI-Papua-Energi Listrik	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	59.292.000,00		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	59.292.000,00		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	59.292.000,00	DTI-Papua-Energi Listrik	
5.2	BELANJA MODAL	25.607.266.000,00		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.607.266.000,00		
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	25.607.266.000,00		
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	24.725.000.000,00		
5.2.04.03.05.0003	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	2.560.000.000,00	DTI-Papua-Energi Listrik	
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	22.165.000.000,00	DTI-Papua-Energi Listrik	
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	882.266.000,00		
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	882.266.000,00	DTI-Papua-Energi Listrik	

2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.350.000.000,00		
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	150.000.000,00		
2.15.02.1.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	150.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
5	BELANJA DAERAH	150.000.000,00		
5.2	BELANJA MODAL	150.000.000,00		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	SUMBER DANA	LOKASI
1	2	3	4	5
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.000.000,00		
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	150.000.000,00		
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	150.000.000,00		
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	150.000.000,00	DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	2.200.000.000,00		
2.15.02.1.03.0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	2.200.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
5	BELANJA DAERAH	2.200.000.000,00		
5.2	BELANJA MODAL	2.200.000.000,00		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.200.000.000,00		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	2.200.000.000,00		
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.200.000.000,00		
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	2.200.000.000,00	DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	9.000.000.000,00		
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	7.000.000.000,00		
2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	7.000.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
5	BELANJA DAERAH	7.000.000.000,00		
5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000.000,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.000.000.000,00		
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.000.000.000,00		

5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.000.000.000,00	DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	
5.2	BELANJA MODAL	6.000.000.000,00		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.000.000.000,00		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	6.000.000.000,00		
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.000.000.000,00		
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	6.000.000.000,00	DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	SUMBER DANA	LOKASI
1	2	3	4	5
2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.000.000.000,00		
2.15.03.1.10.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.000.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
5	BELANJA DAERAH	2.000.000.000,00		
5.2	BELANJA MODAL	2.000.000.000,00		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.000.000.000,00		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	2.000.000.000,00		
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.000.000.000,00		
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	2.000.000.000,00	DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	
2.15.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	500.000.000,00		
2.15.04.4.02	Pembangunan Bandar Udara	500.000.000,00		
2.15.04.4.02.0003	Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara	500.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
5	BELANJA DAERAH	500.000.000,00		
5.2	BELANJA MODAL	500.000.000,00		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	500.000.000,00		
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	500.000.000,00		
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	500.000.000,00		
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	500.000.000,00	DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	
2.16.2.20.2.21.10.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	5.046.105.000,00		

2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	5.046.105.000,00		
2.16.03.1.02.0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	5.046.105.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
5	BELANJA DAERAH	5.046.105.000,00		
5.1	BELANJA OPERASI	5.046.105.000,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.046.105.000,00		
5.1.02.01	Belanja Barang	49.705.000,00		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	49.705.000,00		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	SUMBER DANA	LOKASI
1	2	3	4	5
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	43.800.000,00	DTI-Papua-Telekomunikasi	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.905.000,00	DTI-Papua-Telekomunikasi	
5.1.02.02	Belanja Jasa	4.996.400.000,00		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.990.000.000,00		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.990.000.000,00	DTI-Papua-Telekomunikasi	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.400.000,00		
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.400.000,00	DTI-Papua-Telekomunikasi	

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum,
Dr. Anace Nauw, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19731116 200212 2 001

